

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi hampir selalu identik dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi output barang dan jasa pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara, namun pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya indikator suksesnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, juga perlu diperhatikan seberapa jauh kontribusi seluruh lapisan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi atau seberapa jauh pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain nilai pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan juga perlu dilihat sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Distribusi pendapatan adalah salah satu alat untuk melihat pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Banyak negara menggarap sektor tersebut dengan serius dan menjadikannya sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pariwisata dijadikan sebagai sumber perolehan devisa, penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. World Tourism Organization atau WTO (2002) meramalkan bahwa sektor pariwisata akan menjadi industri terbesar di dunia. WTO juga meramalkan bahwa pada tahun 2010, jumlah wisatawan dunia mencapai 1,018 milyar orang dan akan menghasilkan perolehan devisa sebesar US\$ 3,4 trilyun, serta memberikan lapangan pekerjaan kepada 204 juta orang di dunia. Investasi pariwisata dunia diperkirakan mencapai 10,7 persen dari total permodalan dunia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> World Tourism Organization (WTO), 2002, Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism, Madrid

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin memacu sektor-sektor yang dianggap memiliki peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sektor tersebut adalah sektor pariwisata yang diharapkan dapat menjadi sumber penghasil devisa negara dan menggerakkan perekonomian nasional. Apabila pada periode tahun 1984-1985 pariwisata berada pada peringkat ke-7 sebagai penghasil devisa negara, maka sepuluh tahun kemudian, pariwisata berada pada urutan kedua setelah migas.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ±18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki banyak potensi dan keunikan alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju yang kebanyakan beriklim non tropis. Keunikan alam inilah yang seharusnya menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dari negara-negara maju yang bermaksud mengunjungi tempat-tempat beriklim tropis yang berbeda dengan iklim di negara asalnya.

Di ASEAN, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah terluas. Pada umumnya, negara-negara ASEAN memiliki karakteristik iklim (tropis) dan bentangan alam yang hampir sama, budaya dan peninggalan sejarahnya juga hampir sama. Sebagai negara terluas di ASEAN, Indonesia seharusnya memiliki obyek wisata dan budaya yang lebih banyak dan beragam sehingga menjadi keunggulan Indonesia untuk menarik lebih banyak wisatawan asing dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Namun, dalam periode semester pertama (Januari-Juni) tahun 2009 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya sebesar 2.965.472 orang. Angka ini berada jauh di bawah Malaysia (11.346.444 orang), Thailand (6.606.706 orang), dan Singapura (4.508.434 orang) pada periode yang sama. Ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga disebabkan oleh lemahnya promosi dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata<sup>2</sup>. Padahal, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, situs peninggalan purbakala dan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya merupakan sumber daya yang besar bagi usaha pengembangan dan

---

<sup>2</sup> Merupakan kesimpulan dari The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008

peningkatan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1.1 Statistik Kunjungan Wisatawan di Indonesia (2001 – 2008)

Tahun	Wisatawan Domestik		Wisatawan Mancanegara	
	Jumlah Wisatawan (000 Orang)	Pengeluaran Wisatawan (Trilyun Rupiah)	Jumlah Wisatawan (000 Orang)	Penerimaan Devisa (Juta USD)
2001	103.884	58,71	5.154	5.396,26
2002	105.379	68,82	5.033	4.305,56
2003	110.030	70,87	4.467	4.037,02
2004	111.353	71,70	5.321	4.797,88
2005	112.701	74,72	5.002	4.521,89
2006	114.270	88,21	4.871	4.447,98
2007	115.335	108,96	5.506	5.345,98
2008	117.213	123,17	6.429	7.377,39

Sumber: 1. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan (P2DSJ),  
2. Statistical Report on Visitor Arrivals to Indonesia

Pada tahun 2008, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 6.429.027 orang, dan menghasilkan pendapatan devisa bagi negara sebanyak US\$ 7,38 milyar. Sementara itu jumlah wisatawan domestik mencapai 117.213.000 orang dengan jumlah total pengeluaran Rp. 123,17 trilyun (Tabel 1.1). Jumlah perolehan devisa ini ditentukan oleh jumlah pengunjung/wisatawan, banyaknya pengeluaran/belanja wisatawan dan lamanya berkunjung. Keberadaan industri pariwisata juga merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah melalui berbagai pajak, seperti pajak perhotelan dan rumah makan, pajak transportasi, pajak penjualan, pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Pariwisata juga mendorong dilakukannya investasi pada infrastruktur sebagai penunjang pariwisata seperti bandara, jalan, pelabuhan, pemeliharaan museum, monumen, kawasan wisata, dan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan serta fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan publik lainnya. Perkembangan sektor pariwisata diharapkan membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan industri-industri yang terkait seperti hotel, rumah makan, biro perjalanan dan

usaha kecil menengah di daerah-daerah kunjungan wisata karena dapat memproduksi dan menjual barang-barang cinderamata.

Dalam Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia tahun 2005-2009, disebutkan bahwa sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong cinta tanah air.
2. Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional.
4. Meningkatnya produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif.
5. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Dimensi keadilan dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia juga menjadi perhatian serius pemerintah yang tertuang pada nilai-nilai yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Nilai-nilai keadilan tersebut sebagian diantaranya adalah keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, hilangnya praktek monopoli, serta adanya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal<sup>3</sup>.

Pembangunan bidang kepariwisataan sebagai salah satu sektor andalan pemerintah masa kini, seharusnya berkembang seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan potensi masyarakat kecil yang ada di sekitar lokasi wisata.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan (Mathieson dan Wall, 1981; Luebben, 1995; Max, 2004 dalam Damanik, 2005) memberikan kesimpulan bahwa secara signifikan, pariwisata dapat memberikan sumbangan kepada negara dalam tiga bentuk yaitu: perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan

---

<sup>3</sup> Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005-2009

devisa serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Demikian pula kesimpulan yang dibuat oleh International Union of Official Travel Organization (IUOTO) dalam Roma Convention tahun 1963 menyatakan bahwa pembangunan pariwisata dapat mengembangkan daerah-daerah miskin dan semula terpencil menjadi lokasi industri baru. Kesimpulan IOUTO tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Kesimpulan-kesimpulan di atas tidaklah berlebihan mengingat cakupan kegiatan pariwisata yang cukup luas sehingga memiliki *multiplier effect* yang besar dan tersebar ke berbagai sektor perekonomian.

Walaupun diakui secara makro bahwa pariwisata memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perolehan devisa dan penciptaan tenaga kerja, namun upaya pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di tingkat mikro tidak akan berhasil apabila tidak dilakukan dengan serius dan strategi yang tepat. Adapun beberapa strategi pengembangan pariwisata yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan adalah perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi penduduk miskin yang berada di sekitar lokasi wisata, pengurangan dampak lingkungan dan dampak sosial budaya yang negatif bagi masyarakat miskin, serta pengembangan kelembagaan yang mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Strategi-strategi tersebut seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan dan memberikan akses kepada masyarakat miskin dalam keterlibatannya terhadap pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah.

Pemerintah dan *stakeholder* terkait perlu merumuskan konsep yang fokus memposisikan pariwisata tidak hanya sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi semata, namun juga berperan sebagai alat untuk mendistribusikan sumberdaya dengan lebih adil dan merata. Pemerintah tidak dapat berharap pada bekerjanya secara otomatis teori *trickle-down effect*, justru jika dibiarkan saja tanpa adanya regulasi dan intervensi melalui strategi pemerintah yang tepat, yang akan terjadi mungkin justru sebaliknya yaitu *trickle-up effect*. Pariwisata memang memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan, namun di sisi lain, pariwisata juga memiliki potensi untuk menciptakan kemiskinan dan memperbesar kesenjangan sosial sehingga

kebijakan pengembangan pariwisata seharusnya memperhatikan kedua potensi yang saling bertolak belakang tersebut.

Kontribusi pariwisata pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara efektif dilakukan dengan sejumlah cara, diantaranya :

1. Menciptakan peluang baru khususnya di daerah-daerah terpencil dan pinggiran yang sekaligus menarik bagi wisatawan.
2. Tingkat kesulitan dalam membentuk bisnis usaha kecil baru di bidang pariwisata relatif kecil karena sifatnya yang tidak padat modal.
3. Memperluas kesempatan untuk penjualan barang dan jasa tambahan yang dapat diusahakan oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
4. Pariwisata merupakan sebuah industri padat karya sehingga bisa banyak menyediakan lapangan pekerjaan.
5. Pariwisata berpeluang besar mendukung aktivitas-aktivitas tradisional yang banyak diusahakan oleh masyarakat miskin seperti pertanian dan kerajinan.

Sedangkan kontribusi pariwisata bagi pemiskinan dan penciptaan kesenjangan yang semakin besar terjadi antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Pengembangan kawasan-kawasan wisata yang eksklusif sehingga masyarakat lokal menjadi terpinggirkan dari pengelolaan sumber daya alam yang menjadi sumber mata pencahariannya.
2. Pemenuhan kebutuhan industri pariwisata yang menggunakan bahan baku dan produk dari luar wilayah setempat sehingga menutup peluang berusaha bagi masyarakat sekitar.
3. Naiknya harga-harga yang merupakan dampak dari berkembangnya suatu daerah menjadi kawasan industri wisata baru yang menyebabkan naiknya biaya pemenuhan kebutuhan hidup terutama bagi masyarakat miskin.

4. Dampak negatif akibat penggunaan bahan lokal untuk keperluan industri pariwisata yang terlalu berlebihan yang mengakibatkan kelangkaan bagi masyarakat setempat.

Adapun keunggulan industri pariwisata adalah pada cakupan kegiatan yang sangat luas dan lintas sektoral sehingga berkaitan dengan berbagai kegiatan produksi, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila pariwisata tidak hanya dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan sumber daya agar lebih adil dan merata. Hal inilah yang sebenarnya merupakan keunggulan dalam peran industri pariwisata. Jika tidak dilakukan, maka pariwisata akan sama dengan sebagian besar industri padat modal lainnya yang hanya menguntungkan pemilik modal.

Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan dua contoh daerah yang berhasil mengembangkan pariwisatanya sehingga menjadi sektor unggulan. Pada tahun 2008, kontribusi sektor-sektor yang termasuk dalam usaha pariwisata di Bali mencapai 20,67 persen terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), sedangkan di DIY berkontribusi sebesar 12,24 persen.

Secara nasional, kontribusi sektor-sektor terkait pariwisata terhadap PDB terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2004 kontribusinya masih mencapai 3,33 persen, pada tahun 2009 kontribusinya meningkat menjadi 3,45 persen (Tabel 1.2). Sektor pariwisata yang paling besar kontribusinya terhadap PDB adalah sektor Restoran. Jika dilihat pertumbuhannya pada skala nasional, sektor-sektor pariwisata secara keseluruhan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan PDB walaupun dalam lima tahun terakhir, sektor Hotel mengalami kecenderungan perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2005, terjadi tragedi bom Bali II yang mengakibatkan terjadi perlambatan pertumbuhan seluruh sektor-sektor terkait pariwisata. Tragedi bom Bali II sangat berpengaruh bagi kepariwisataan Indonesia karena Bali merupakan destinasi utama pariwisata di Indonesia.

Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Indonesia (2004 - 2009)

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>ADHK 2000 (Milyar)</b>						
PDB	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.126,7	1.963.091,8	2.082.103,7	2.176.975,5
Hotel	11.590,7	12.313,2	12.950,5	13.645,6	14.200,9	14.774,9
Restoran	37.261,5	39.453,7	41.723,2	44.675,7	47.615,4	51.200,4
Rekreasi dan Hiburan	6.302,1	6.713,1	7.246,7	7.773,1	8.449,1	9.065,1
<b>Pertumbuhan (%)</b>						
PDB	5,03	5,69	5,50	6,28	6,06	4,56
Hotel	7,93	6,23	5,18	5,37	4,07	4,04
Restoran	6,08	5,88	5,75	7,08	6,58	7,53
Rekreasi dan Hiburan	8,34	6,52	7,95	7,26	8,70	7,29
<b>Share (%)</b>						
Hotel	0,70	0,70	0,70	0,70	0,68	0,68
Restoran	2,25	2,25	2,26	2,28	2,29	2,35
Rekreasi dan Hiburan	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42
Total Share (%)	3,33	3,34	3,35	3,37	3,37	3,45

Sumber: BPS (telah diolah kembali)

Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar namun belum dikembangkan secara maksimal adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Potensi wisata yang terdapat di daerah ini adalah wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Wisata alam yang menonjol di daerah ini adalah wisata bahari di Kepulauan Togean. Selain itu, juga terdapat kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan keanekaragaman flora dan fauna khas Sulawesi, Danau Poso, Danau Lindu, kawasan peninggalan sejarah megalitikum di Lembah Bada, dan masih banyak lagi. Beragam suku dengan keunikan adat istiadatnya yang terdapat di daerah ini juga tidak kalah menariknya untuk menjadi potensi daya tarik bagi wisatawan.

Potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah belum dikembangkan secara maksimal. Jika dibandingkan dengan dua provinsi tetangganya yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah masih tertinggal

**Universitas Indonesia**

dalam pengembangan bidang pariwisata. Pada tahun 2008 (BPS, 2009), total sumbangan sub sektor hotel, restoran dan jasa rekreasi di Sulawesi Tengah hanya sebesar 0,77 persen terhadap PDRB atau sebesar 113 milyar, sementara Sulawesi Utara sebesar 583 milyar (3,49 persen) dan Sulawesi Selatan sebesar 1.310 milyar (1,54 persen).

Di Sulawesi Tengah, salah satu jenis wisata yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah wisata bahari. Jenis wisata bahari sesuai dengan karakteristik geografis Sulawesi Tengah yang sebagian besar wilayahnya berada di daerah pesisir dan memiliki keindahan bawah laut yang tidak kalah dengan daerah lainnya. Panorama laut di wilayah ini menjadi daya tarik alamiah bagi wisatawan. Salah satu obyek keindahan alam bawah laut yang terkenal adalah kepulauan Togean.

Sebanyak 99 persen dari total wisatawan yang datang ke Sulawesi Tengah merupakan wisatawan nusantara. Apabila dibandingkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mulai tahun 2004 sampai dengan 2008, dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan nusantara jauh lebih banyak dibandingkan wisatawan mancanegara (Tabel 1.3).

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Sulawesi Tengah (2004-2008)

Tahun	Jumlah wisatawan (Orang)	
	Asing	Domestik
2004	705	83.508
2005	572	84.254
2006	527	63.929
2007	673	61.565
2008	919	53.908

Sumber: BPS Sulawesi Tengah (2009)

Kondisi perekonomian Sulawesi Tengah terus mengalami pertumbuhan yang positif, bahkan angka pertumbuhannya terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. PDRB Sulawesi Tengah meningkat dari Rp. 10,92 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp. 14,46 trilyun di tahun 2008 (ADHK 2000). Namun, pertumbuhan ekonomi di daerah ini dalam kurun waktu tersebut menunjukkan

**Universitas Indonesia**

tingkat pemerataan yang semakin timpang. Hal ini dapat dilihat dari koefisien gini yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2004 koefisien gini mencapai 0,2957; maka tahun-tahun berikutnya cenderung terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2008 mencapai 0,340.

## 1.2 Perumusan Masalah

Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh (*comprehensive*) dapat menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata, misalnya kerusakan lingkungan, meningkatnya urbanisasi ke lokasi obyek wisata yang akan meningkatkan permasalahan sosial antara lain meningkatnya tindak kriminalitas dan kegiatan sektor informal yang tidak terkendali. Dalam mengelola kawasan pariwisata, juga perlu memperhatikan aspek keberpihakan pada masyarakat sekitar obyek wisata melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan, terutama kepada kelompok masyarakat penghasilan rendah.

Tujuan pembangunan tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan nasional akan berhasil jika pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan merupakan kinerja pokok perekonomian suatu negara, sedangkan pemerataan mengacu pada pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga pemerataan akan terjadi apabila masalah pengangguran teratasi dengan baik dan pendapatan terdistribusi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi diharapkan berkualitas dan memiliki sensitifitas terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan uraian-uraian pada pendahuluan di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana dampak pembangunan bidang pariwisata terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Menganalisis struktur pendapatan rumah tangga pada setiap sektor perekonomian yang ada di Sulawesi Tengah melalui pengembangan model Tabel Input-Output menjadi model Tabel Miyazawa.
2. Menganalisis dampak pembangunan pariwisata terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **1.4 Kerangka Pemikiran**

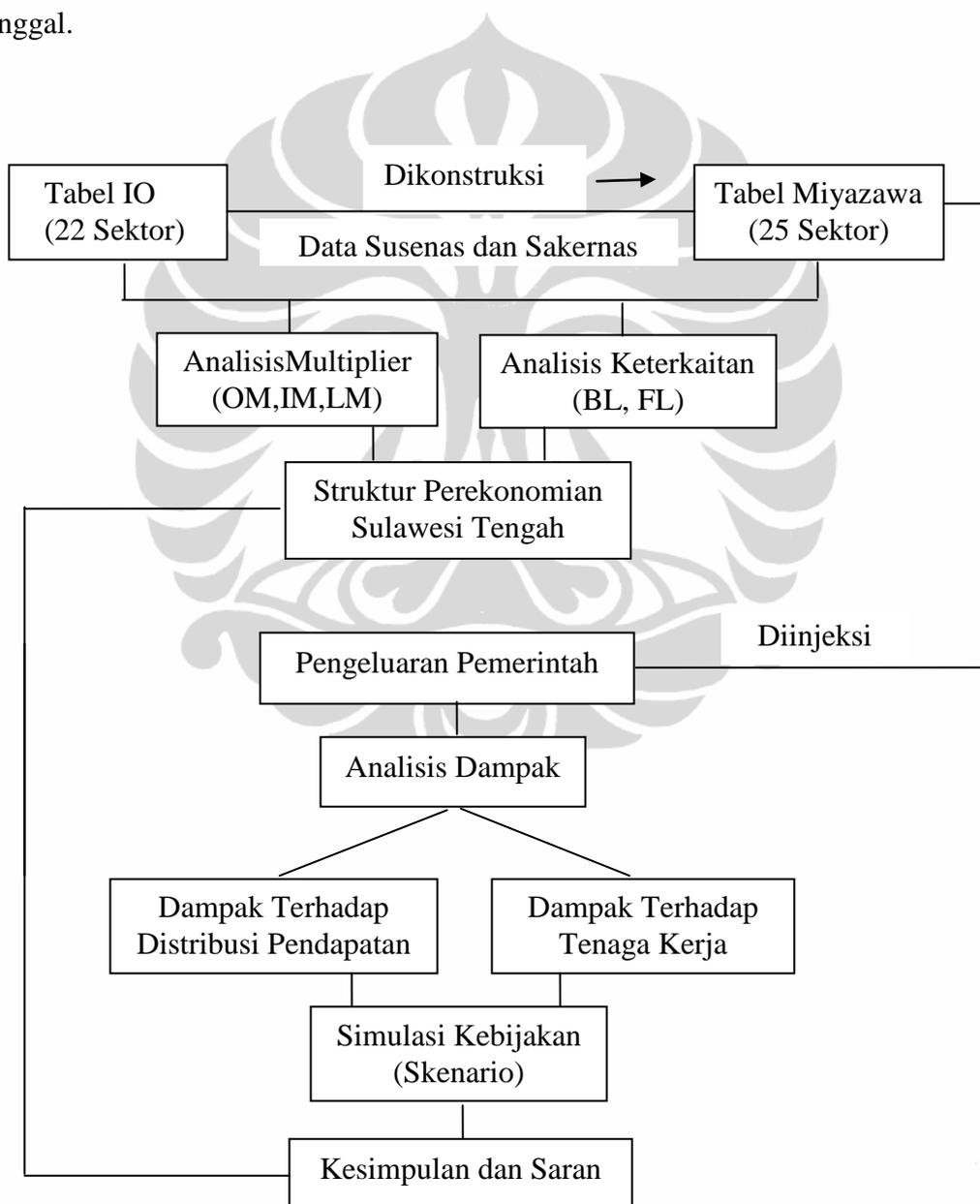
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah berusaha memacu semaksimal mungkin sektor-sektor yang dianggap memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sektor tersebut adalah sektor pariwisata, yang diharapkan dapat menjadi sumber penghasil devisa negara dan menggerakkan perekonomian nasional.

Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki banyak potensi dan keunikan alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju yang sebagian besar beriklim non tropis. Di Indonesia terdapat keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala dan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumberdaya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan, yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Industri pariwisata juga merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah melalui berbagai pajak, seperti pajak perhotelan dan rumah makan, pajak transportasi, pajak penjualan, pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Selain itu, pariwisata juga mendorong untuk dilakukannya investasi pada infrastruktur sebagai penunjang pariwisata seperti bandara, jalan, pelabuhan, pemeliharaan museum, monumen, kawasan wisata dan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan serta fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan publik lainnya. Perkembangan sektor pariwisata diharapkan membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan industri-industri yang terkait seperti hotel, rumah

makan, biro perjalanan dan usaha kecil menengah di daerah-daerah kunjungan wisata karena dapat memproduksi dan menjual barang-barang cenderamata.

Dimensi keadilan dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia sepatutnya menjadi perhatian serius pemerintah. Adapun nilai-nilai keadilan tersebut diantaranya adalah keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, hilangnya praktek monopoli, serta adanya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Analisis Penelitian

Pembangunan yang dilaksanakan hingga saat ini belum berpihak pada rakyat miskin. Pertumbuhan ekonomi pun belum merata, dengan kata lain pembangunan belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bidang kepariwisataan sebagai salah satu sektor andalan pemerintah masa kini seharusnya berkembang seiring dengan upaya pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi upaya pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan potensi masyarakat kecil yang ada di sekitar lokasi wisata.

Pada akhirnya, tujuan pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata. Kesejahteraan yang menyeluruh dan berkualitas tercipta melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pertumbuhannya. Pemerataan pertumbuhan yang identik dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah melalui pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja.

### **1.5 Hipotesis Penelitian**

Dalam penelitian ini, hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pariwisata di Sulawesi Tengah memiliki dampak yang besar pada peningkatan output sektoral, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja.
2. Pembangunan pariwisata di Sulawesi Tengah mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan rumah tangga dan memperbaiki distribusi kesempatan kerja.

### **1.6 Ruang Lingkup dan Metodologi**

Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Sulawesi Tengah memiliki beberapa potensi obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan. Letaknya yang berada diantara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan sebagai pintu masuk

wisatawan (memiliki bandara internasional), menjadikan Sulawesi Tengah sebagai jalur yang strategis bagi perjalanan wisatawan.

Dalam pembangunan suatu daerah atau negara diperlukan suatu alat yang mampu menganalisis dampak dan keterkaitan antar kegiatan ekonomi atau sektor dalam perekonomian. Dampak suatu sektor secara komprehensif dapat diketahui melalui suatu analisis yang menghasilkan informasi, yang mencakup dampak langsung dan tidak langsung, dan juga disebabkan oleh kegiatan sektor tersebut. Dampak langsung dari kegiatan ekonomi tersebut manfaat langsung pada sektor yang bersangkutan. Adapun dampak tidak langsungnya adalah manfaat yang diperoleh sektor-sektor lainnya akibat kegiatan ekonomi tersebut. Dampak tidak langsung dari peran suatu sektor dapat diketahui dengan menganalisa keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem ekonomi. Adanya keterkaitan ini dapat dilihat dari sisi output maupun dari sisi input. Keterkaitan dari sisi output disebabkan hasil produksi dari sektor tersebut akan digunakan sebagai input bagi sektor lainnya (*forward linkage*) sedangkan keterkaitan dari sisi input timbul karena sektor tersebut juga menggunakan input yang berasal dari sektor lainnya (*backward linkage*).

Salah satu alat analisis yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian adalah analisis input-output (I-O). Selain digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor, kelebihan lain dari model ini adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi terhadap total *output* dari tiap sektor apabila terjadi perubahan permintaan akhir terhadap output suatu sektor di perekonomian. Kelebihan-kelebihan tersebut di atas menyebabkan model ini banyak digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan.

Untuk mengetahui dampak dari meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap output perekonomian, penyediaan lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan, penelitian ini menggunakan kombinasi antara tabel input-output Provinsi Sulawesi Tengah dan modifikasinya yaitu tabel Miyazawa. Analisis input-output digunakan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor pariwisata terhadap output perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja,

**Universitas Indonesia**

dan pendapatan masyarakat. Sementara model Miyazawa secara lebih khusus melihat dampaknya terhadap distribusi pendapatan masyarakat yang sebelumnya telah dikelompokkan berdasarkan kriteria pengelompokan oleh Bank Dunia.

Penelitian ini menggunakan tabel input-output Sulawesi Tengah tahun 2005 menurut harga produsen sebagai tabel dasar bagi analisisnya. Pemilihan tabel input-output tahun 2005 ini didasari pada ketersediaan tabel terkini yang dibuat menurut hasil survey yang dilakukan oleh BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Selain tabel input-output Provinsi Sulawesi Tengah 2005, data lain yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Susenas).
2. Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha (Sakernas).
3. Data Survey Industri Pariwisata.
4. Data Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Data Susenas dan Sakernas diperlukan dalam mengkonstruksi tabel *input output* biasa menjadi tabel model Miyazawa. Sumber data-data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan instansi terkait lainnya serta sumber lain yang berasal dari penelitian sebelumnya.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam 6 (enam) bab dengan alur dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, serta ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian.

Bab II berisi kerangka teori berupa argumen teoritik maupun temuan empirik yang terkait dengan obyek dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV memberi gambaran umum tentang kondisi pariwisata dan perekonomian di daerah penelitian.

Bab V memuat tentang inti penelitian. Dalam bab inilah hasil analisis terhadap sampel penelitian akan dibahas menggunakan metode-metode yang telah ditentukan pada bab sebelumnya.

Bab VI berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

